



LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2025 (Hasil Penilaian Mandiri)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

PEMERINTAHAN KOTA TARAKAN
KALIMANTAN UTARA



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jenderal Sudirman Gedung Gadis I Lt. II Telp. 2027698

E-Mail : dp3appkb@tarakankota.go.id

TARAKAN (77121)

Tarakan, 24 Februari 2025

Nomor : 700/97-I/ DP3APPKB
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Hasil Penilaian Mandiri / Evaluasi
atas Implementasi SAKIP Th. 2024**

Kepada

Yth. Inspektur Kota Tarakan

di -

Tarakan

Dengan ini disampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri/Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Kota Tarakan dengan uraian sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu bentuk sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penilaian mandiri atas implementasi SAKIP dilakukan agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada pimpinan organisasi. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan maka diperlukan *self assesment*. Dengan penilaian mandiri ini, diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja (sekretariat/perangkat kerja/seksi/ untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Tujuan evaluasi dengan penilaian mandiri adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja kami dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*resultoriented government*).

Secara lebih rinci sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah maupun unit kerja dibawahnya (Sekretariat/Bidang/Sub Bag/Subkor).

Pelaksanaan evaluasi AKIP dengan penilaian mandiri menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

II. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yaitu :

No.	Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP	Realisasi Tindak Lanjut
1.	Memperbaiki Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan agar semua tujuan yang terdapat pada Renstra memiliki indikator kinerja sebab masih ditemukan tujuan yang tidak memiliki indikator kinerja pada Renstra Perubahan 2019-2024	Perbaikan telah dilakukan pada Renstra Transisi 2025-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dengan pemberian indikator kinerja pada setiap tujuan yang terdapat pada Renstra.
2.	Melakukan pemantau rencana aksi per-triwulan digunakan untuk pengendalian kinerja, hasil ini didokumentasi dan ditindaklanjuti serta dilakukan monitoring	Pemantauan rencana aksi dilaksanakan setiap triwulan, dilakukan dokumentasi dan monitoring

No.	Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP	Realisasi Tindak Lanjut
3.	Melengkapi dokumen LKJIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan di tahun selanjutnya maka penyusunan Laporan Kinerja sebaiknya menyajikan perbandingan capaian IKU tahun-tahun sebelumnya bukan hanya pada tahun berjalan saja.	Perbaikan dokumen LKJIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2024 dengan melengkapi / menambahkan perbandingan realisasi kinerja capaian IKU tahun berjalan dengan target dan capaian realisasi kinerja capaian IKU tahun-tahun sebelumnya.
4.	Menyusun diagram crosscutting dan pohon kinerja	Penyusunan diagram crosscutting dan pohon kinerja tindak lanjut hasil rekomendasi evaluasi SAKIP dari Tim Evaluator APIP yang akan menjadi acuan untuk perbaikan pelaksanaan SAKIP kedepannya

III. HASIL PENILAIAN MANDIRI

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Men PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Walikota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-III/215/2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dengan hasil sebagai berikut :

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			Th. 2023 (Hasil Evaluasi APIP)	Th. 2024 (Hasil PM Internal OPD)
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,70	23,70
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,00	22,15
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,60	12,60
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	25	10	21,30
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,30	79,75
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Hasil Penilaian Mandiri / evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Tarakan menunjukkan nilai **79,75** dengan predikat “**BB**”. Penjelasan lebih lanjut atas hasil penilaian mandiri AKIP tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi Perencanaan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- 1) Dalam Penyusunan Perencanaan Kinerja telah dikomunikasikan dengan Internal OPD, Eksternal OPD dan Stekholder, Dokumen Perencanaan, serta Laporan LHE.
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)
- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi Pengukuran Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- 1) Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sudah menggunakan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Juga sudah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan menerapkan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi Pelaporan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- 1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala, Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan dan Dokumen Laporan Kinerja telah direviu serta telah Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
- 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai

- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja serta Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, strategi/rekomendasi yang kami laksanakan sebagai berikut:

- 1) Dokumen Laporan Kinerja agar disampaikan tepat waktu sesuai jadwal.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- 3) Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan secara berjenjang.
- 5) Hasil Evaluasi akuntabilitas agar ditindak lanjuti dengan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.

Demikian disampaikan hasil Penilaian Mandiri / evaluasi atas implementasi AKIP di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, sebagai penerapan manajemen kinerja. Dalam rangka memberikan penilaian yang independen dan obyektif atas implementasi SAKIP terhadap hasil Penilaian Mandiri (PM) tersebut diminta atas bantunnya untuk melaksanakan Penjaminan Kualitas implementasi SAKIP organisasi kami tahun 2024.

Tarakan, 24 Februari 2025
Kepala DP3APPKB Kota Tarakan



Hasman Parigi, S.E., M.M
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 19720822 2010011 001